



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

*Jl. Mayjend Soetoyo No.10, RT.4/RW.14, Cililitan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640*

*Telepon : (021) 8091908 – 8002192 Faksimili : (021) 8002265 – 8011753*

*Laman : <https://www.bphn.go.id> Email : [humas@bphn.go.id](mailto:humas@bphn.go.id)*

29 September 2023

Nomor : PHN.3-KP.10.02-330  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pembukaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan  
Analisis Hukum

**Kepada Yth.**

Pimpinan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analisis Hukum  
di

Tempat

Dalam rangka kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan HAM membuka Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum untuk seluruh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analisis Hukum pada bulan November 2023.
2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
  - b. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Analisis Hukum.
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin/sedang.
3. Permohonan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Pemerintah kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. salinan PAK terakhir;

- b. salinan persetujuan kebutuhan/formasi Jabatan Fungsional Analis Hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
  - c. salinan keputusan jabatan terakhir atau salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum;
  - d. salinan keputusan pangkat/golongan terakhir;
  - e. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;.
5. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disiapkan dalam bentuk *soft copy* pada media penyimpanan online (*Gdrive/cloud*) dengan menyertakan link akses dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
6. Permohonan dan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 diterima paling lambat 11 Oktober 2023.
7. Pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi akan dikirimkan surat pemanggilan peserta uji kompetensi dan wajib mengikuti uji kompetensi;
8. Uji kompetensi terdiri dari uji kompetensi teknis, uji kompetensi manajerial, dan uji kompetensi sosial kultural.
9. Analis Hukum yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural adalah dengan perolehan nilai kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi seseorang keseluruhan paling kurang 68% (enam puluh delapan persen) dengan bobot penilaian sebagai berikut:
  - a. jenjang ahli utama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pada nilai uji kompetensi teknis dan 65% (enam puluh lima persen) pada nilai Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural;
  - b. jenjang ahli madya sebesar 40% (empat puluh persen) pada nilai uji kompetensi teknis dan 60% (enam puluh persen) pada nilai Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural;
  - c. jenjang ahli muda sebesar 50% (lima puluh persen) pada nilai uji kompetensi teknis dan 50% (lima puluh persen) pada nilai Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultura
10. Waktu, tempat, metode, dan tata cara uji kompetensi akan diinformasikan bersamaan dengan Surat Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada angka 7.
11. Pegawai yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh Instansi Pembina, mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina;
12. Rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 11 menjadi dasar pengangkatan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan informasi dimaksud kepada Analis Hukum di instansi Saudara. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Jupiter (0857-1511-3435) dan Sdri. Ria (0812-9907-8343).

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,  
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yunan Hilmy, S.H., M.H.

NIP. 19631215 199203 1 002